Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014

Nama : Muh. Tyas Zulfikar

Nim : 11313105

Prodi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2016

Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

(Tahun 2010-2014)

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Jurusan Ilmu Ekonomi

Pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Muh. Tyas Zulfikar

Nomor Mahasiswa : 11313105

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 11November 2016

Penulis,



Muh. Tyas Zulfikar

PENGESAHAN

Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

(Tahun 2010-2014)

Nama	**: Muh. Tyas Zulfikar**
Nomor Mahasiswa	**: 11313105**
Jurusan	**: Ilmu Ekonomi**

Yogyakarta, 11 November 2016

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Dra. Diana Wijayanti, M.Si

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

EFISIENSI SEKTOR PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2014

Disusun Oleh : **MUH. TYAS ZULFIKAR**

Nomor Mahasiswa : **11313105**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 13 Desember 2016

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Diana Wijayanti, Dra., M.Si. .....

Penguji : Ari Rudatin, Dra., M.Si. .....

Agus Widarjono, SE., MA.,Ph.D .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN MOTTO

Kau tak akan pernah mampu menyeberangi lautan sebelum kau berani berpisah dengan daratan. (CHRISTOPER COLOMBUS)

Bermimpilah seakan kau hidup selamanya, Hiduplah seakan kau mati hari ini. (JAMES DEAN)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin. Puja dan puji syukur Saya ucapkan
atas kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan petunjuk-Nya
Skripsi ini dapat diselesaikan.

Karya ini Saya persembahkan kepada:
Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Anton dan Ibunda Munira
yang selalu mendoakan dan membimbing Saya selama masa pendidikan
hingga saat penyusunan skripsi ini.

Serta saudara-saudari tersayang Saya, Nian faradillah Nur yaqin, Ilham Ahmad
Al-Gasali, Syamsidar Nur Annisa, Muh. Rizky Al-Habsy dan Annisa Nur Taqiyah
yang selalu memberikan dukungan dan semangat
agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya dengan memberikan jalan kemudahan, keteguhan hati dan kesabaran sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tahun 2010-2014)". Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia menuju zaman kecerdasan dan kebenaran.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Ibu Diana Wijayanti, Dra., M.Si. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan pengarahan dan dorongan motivasi dengan penuh kesabaran.
2. Bapak Dwipraptono Agus Harjito, Dr., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Akhsyim Afandi, Drs., MA., Ph.D. selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi.
4. Semua dosen dan civitas akademi FE UII.

5. Kepada saudara-saudaraku penulis di Ilmu Ekonomi angkatan 2011.
6. Keluarga tak sedarah di Ganteng Mubazzir
7. Keluarga besar Kontrakan Janda
8. Kepada saudara-saudariku di GC 35 Mapala UNISI
9. Semua rekan, sahabat dan kerabat-kerabat terdekat penulis.

Harapan besar penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Sehubungan dengan kemampuan penulis yang sangat terbatas, dengan sangat rendah hati penulis menerima setiap saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 November 2016

Muh. Tyas Zulfikar

DAFTAR ISI

Halaman Judul……i

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme……ii

Halaman Pengesahan Skripsi…….....iii

Halaman Pengesahan Ujian Skripsi…… iv

Halaman Motto.....…… v

Halaman Persembahan…… vi

Halaman Kata Pengantar…… vii

Halaman Daftar Isi…….. viii

Halaman Daftar Tabel…… xi

Halaman Abstrak…… xii

BAB I PENDAHULUAN ……..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah …… 1

1.2. Rumusan Masalah …….. 6

1.3. Tujuan Penelitian ……... 6

1.4. Manfaat Penelitian ……. 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……..... 9

2.1. Penelitian Terdahulu …….. 9

2.2. Landasan Teori …….. 11

2.2.1. Pengertian dan Konsep Efisiensi ……. 11

2.2.2. Sektor Publik …… 12

2.2.3. Efisiensi Sektor Publik ……. 12

2.2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)……. 13

2.2.4.1 APBN berdasarkan penerimaan…….. 13

2.3 Pembangunan Ekonomi ……..… 14

2.3.1. PDRB…….. 16

2.3.2. Kemiskinan…….. 17

2.4. Kerangka Pemikiran …… 18

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ……..……. 19

3.1. Jenis dan Sumber Data ……..……... 19

3.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian ……... 19

3.3. Metode Analisis Penelitian ……. 21

3.3.1. Konsep Dasar *Data Envelopment Analysis* (DEA) …….. 21

3.3.2. Nilai Manajerial DEA ……... 21

3.3.3. Formulasi DEA ……. 22

3.3.4. Kelebihan dan Kelemahan DEA ……... 24

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN ……. 26

4.1. Gambaran Umum …… 26

4.1.1. Pendapatan Regional …… 26

4.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ……. 26

4.1.2. Kemiskinan ……... 27

4.1.3. Pendapatan Asli Daerah ……... 28

4.1.3.1. Pajak Daerah ……. 29

4.1.3.2. Retribusi Daerah ……... 29

4.1.3.3. Dana Perimbangan ……... 30

4.1.3.2.1. Dana Alokasi Umum (DAU) ……... 31

4.1.3.2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) ……... 31

4.1.3.4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah …….. 32

4.2. Analisis Data dan Pembahasan ……... 33

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI ……... 45

5.1. Simpulan ……. 45

5.2. Implikasi ……. 46

DAFTAR PUSTAKA …… 47

LAMPIRAN ……..

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1. Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Provinsi DIY Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2011)……..... 4

1.2. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY (2009-2013) …….. 5

4.1. PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2009-2013 …… 27

4.2. Penduduk Tidak Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2009-2013 ……. 28

4.3. PAD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2009-2013 …….. 29

4.4. Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2009-2013 ……. 31

4.5. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2009-2013 …….. 32

4.6. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY ……... 35

4.7. Penggunaan Input yang Efisien pada Tingkat Output yang Dihasilkan dan Pemborosan …….. 39

4.8. *Multiplier*, Efisiensi dan *Efficient Reference Set* dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Tidak Efisien pada Tahun 2009-2013 ….. 40

4.9. Penggunaan Input yang Efisien pada Tingkat Output yang Dihasilkan dengan Perbandingan Kabupaten/Kota yang Efisien *(Benchmark)*

…….. 44

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang efisiensi sektor publik dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan alat analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang merupakan metode pengukuran efisiensi dengan menggunakan pendekatan non parametrik. Penelitian ini juga menggunakan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagai variabel input. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau PDRB dan kemiskinan sebagai variabel output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ada tiga dari lima kabupaten/kota di Yogyakarta yang tidak mampu mencapai tingkat efisiensi 100% yaitu kabupaten Gunungkidul pada tahun 2011, Kabupaten Bantul pada tahun 2014 dan Kabupaten Kulonprogo selama lima tahun terakhir antara tahun 2010-2014. Inefisiensi pada kabupaten Gunungkidul, Kabuptaen Bantul dan Kabupaten Kulonprogo tersebut disebabkan oleh pemborosan penggunaan input dibandingkan dengan tingkat output yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka solusinya agar mencapai tingkat efisiensi 100% adalah dengan mengurangi jumlah penggunaan input dan tetap mempertahankan tingkat output yang telah dihasilkan.

Kata Kunci: *efisiensi sektor publik, pembangunan ekonomi, Data Envelopment Analysis (DEA)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, dominasi pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa diabaikan. Dari proporsional rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekitar 80% pendapatan negara dihasilkan oleh mekanisme sektor publik (PPA UGM, 2000). Sektor publik disediakan dengan tujuan menghasilkan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Artinya bahwa alokasi pengeluaran pemerintah harus diikuti dengan penggunaan yang semakin efisien, mengingat bahwa setiap tahunnya pengeluaran pemerintah terus meningkat (Chusnah, 2014). Efisiensi dalam pengeluaran pemerintah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi pengeluaran pemerintah daerah diartikan ketika setiap Rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien (Kurnia, 2006).

Implementasi desentralisasi fiskal (otonomi daerah) di Indonesia dimulai sejak tahun 2001. Dasar hukumnya adalah dengan disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai perubahan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan

desentralisasi fiskal di Indonesia. Dengan menggunakan sistem desentralisasi, proses pembangunan akan berjalan lebih efisien, karena daerah diberi wewenang untuk menyelenggarakan program-program pembangunan, sehingga seluruh pertanggungjawaban, pengelolaan, dan pembiayaan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah dapat mengidentifikasikan preferensinya sendiri dalam hal pelayanan publik. Sehingga diharapkan apabila pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Dengan Undang-Undang yang baru, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kebebasan dan keleluasaan yang lebih besar untuk melakukan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan daerah secara keseluruhan (Utomo dan Hadi, 2009).

Menurut Putra (2013), setelah lebih dari 10 tahun sejak diterapkannya otonomi daerah, Indonesia menghadapi perubahan kondisi pembangunan secara keseluruhan. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah serta terjadinya globalisasi kegiatan ekonomi akan menimbulkan perubahan yang cukup drastis dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pola pembangunan daerah yang selama ini cenderung seragam mulai bervariasi. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi daerah tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah yang bersangkutan.

Pada masa otonomi daerah, kinerja ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan perkembangan ekonomi yang terus menguat setiap tahunnya, dan pada tahun 2010 pertumbuhan ekonominya mencapai 4,87%

yang relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 6,10%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh besarnya PDRB Provinsi DIY tahun 2010 yang mencapai 45.591.853 juta rupiah. Pada dasarnya besarnya PDRB DIY didominasi oleh lima sektor usaha utama yaitu perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 20,79%, lalu sektor pertanian sebesar 17,19%, sektor jasa-jasa sebesar 17,04%, sektor industri pengolahan sebesar 13,28%, serta sektor pengangkutan dan komunikasi 10,67%. Sedangkan keempat sektor lainnya bila diakumulasikan memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu 21,04%. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, perekonomian DIY tahun 2013 tumbuh sebesar 5,40%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,32%. Pertumbuhan ekonomi DIY tumbuh mengesankan karena semua sektor tumbuh positif. Setelah sempat mengalami kontraksi pada tahun 2012, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang paling tinggi daripada yang lain yaitu sebesar 7,81%, disusul sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor bangunan; sektor jasa-jasa; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor pertanian masing-masing sebesar 6,54%, 6,30%, 6,23%, 6,20%, 6,07%, 5,57%, 4,92%, dan 0,63% (BPS, 2014).

Berkembangnya kinerja ekonomi Provinsi DIY juga ditunjukkan oleh perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Provinsi DIY

Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2011)

(Jutaan Rupiah)

Uraian	Kabupaten/Kota	Provinsi
PAD	530.781	721.361
Pajak Daerah	202.512	606.079
Retribusi Daerah	144.376	33.217
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	34.939	21.968
Lain-lain PAD Yang Sah	148.954	57.097

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data pada tabel tersebut, komposisi PAD Kabupaten/Kota terdiri atas 38,2% pajak daerah, 27,2% retribusi daerah, 6,6% hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 28,1% lain-lain PAD yang sah. Sedangkan, komposisi PAD Provinsi terdiri atas 84,4% pajak daerah, 4,6% retribusi daerah, 3,0% hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 7,9% lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah memiliki peran yang sangat signifikan sebagai sumber PAD APBD DIY, persentasenya jauh melebihi sumber-sumber PAD yang lain, seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Namun demikian, meskipun kinerja ekonomi Provinsi DIY mengalami perkembangan bukan berarti telah mengatasi masalah kemiskinan penduduk. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara/daerah manapun. Menurut data BPS, berdasarkan persentase tingkat kemiskinan, kabupaten Kulon Progo merupakan

daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, sedangkan tingkat kemiskinan terendah terdapat di Kota Yogyakarta. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY (2009-2010)

Kabupaten/Kota		2009			2010		
		Garis Kemiskinan (Rp/kap/bulan)	Penduduk Miskin Jumlah (000)	%	Garis Kemiskinan (Rp/kap/bulan)	Penduduk Miskin Jumlah (000)	%
1	Kulonprogo	205.585	89,91	24,65	225.059	90,00	23,15
2	Bantul	224.373	158,52	17,64	245.626	146,90	16,09
3	Gunungkidul	186.232	163,67	24,44	203.873	148,70	22,05
4	Sleman	226.256	117,53	11,45	247.688	117,00	10,7
5	Yogyakarta	265.168	45,29	10,05	290.286	37,80	9,75
Provinsi DIY		220.830	575	16,86	224.258	540,40	16,83

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data pada tabel tersebut, tingkat persentase kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Kulonprogo sebesar 23,15%, Kabupaten Gunungkidul 22,05%, Kabupaten Bantul 16,09%, Kabupaten Sleman 10,7%, dan Kota Yogyakarta 9,75%. Sedangkan persentase tingkat kemiskinan Provinsi DIY sebesar 16,83% pada tahun 2010. Persentase penduduk miskin pada tahun 2010 sebesar 16,83% mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,3% jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada pada tahun 2009 sebesar 16,86%. Meskipun demikian, pada kehidupan yang sebenarnya masih banyak penduduk miskin yang terdapat di Provinsi DIY. Beberapa buktinya adalah dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki tempat tinggal yang layak, masih banyak pengangguran seperti pengamen dan pengemis jalanan

karena masih kurangnya tingkat pelayanan publik yang mereka terima terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **"Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat merumuskan rumusan penelitian yang berdasarkan dari 5 variabel yaitu: 2 variabel output dan 3 variabel input. Mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efisiensi PAD dalam pembangunan ekonomi di DIY?
2. Bagaimana efisiensi Dana Perimbangan dalam pembangunan ekonomi di DIY?
3. Bagaimana efisiensi Lain-lain Pendapatan Yang Sah dalam pembangunan ekonomi di DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan perumusan maslah diatas maka tujuan penelitian in adalah:

1. Untuk mengetahui efisiensi PAD dalam pembangunan ekonomi di DIY.
2. Untuk mengetahui efisiensi Dana Perimbangan dalam pembangunan ekonomi di DIY.
3. Untuk mengetahui efisiensi Lain-lain Pendapatan Yang Sah dalam pembangunan ekonomi di DIY.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini bermanfaaat memberikan sumbangsih konseptual bagi perkembangan dunia ilmu ekonomi dan sebagai pembelajaran penerapan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita di dunia nyata.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi Pemerintah Daerah

      Sebagai masukan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengetahui efisiensi sektor publik terhadap pembangunan ekonomi yang pada akhirnya bisa berguna dalam penyusunan kebijakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

   b. Bagi Penulis

      Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan teori-teori yang ada dan membandingkannya dengan realita yang ada di dunia nyata.

   c. Bagi pembaca

      Memberikan tambahan referensi dan informasi bagi pembaca.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian pustaka yang memaparkan pengkajian dari penelitian-penelitian terdahulu, dan landasan teori membahas teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan di dalam penelitian untuk menjawab hipotesis dan data-data yang digunakan beserta sumber data dalam penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil-hasil dari analisis data yang telah dilakukan serta menjelaskan hasil perhitungan statistik dari masing-masing variabel.

BAB V : Simpulan dan Implikasi

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari pernyataan pada rumusan masalah setelah sebelumnya melalui tahap analisis. Serta menjelaskan implikasi teoritis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Chusnah (2014) dalam penelitiannya yang berjudul efisiensi sektor publik dan kinerja ekonomi daerah (studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa timur) meneliti bahwa pengeluaran publik sebagian besar tidak efisien. Variabel efisiensi sektor publik secara langsung tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel efisiensi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan kecuali variabel infrastruktur yang tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Susilo (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2011) menyatakan bahwa di Provinsi Jawa Tengah penyediaan layanan publik yang efisien hanya terjadi di kota besar saja. Sedangkan pada daerah Kabupaten masih mendapat skor efisien di bawah rata-rata. Kemudian analisa regresi menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal, pajak daerah, tenaga kerja dan aglomerasi menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa tengah.

Susan (2011) meneliti tentang efisiensi fiskal terhadap pembangunan ekonomi propinsi di pulau jawa tahun 2005-2009. Dalam penelitian ini, menggunakan laporan belanja tidak langsung, belanja langsung dan sumber pengeluaran daerah sebagai variabel input. PDRB atau tingkat pertumbuhan

ekonomi dan tingkat kesempatan kerja sebagai variabel output. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: propinsi di pulau jawa yang dapat mencapai dan mampu mempertahankan tingkat efisiensi 100% dari tahun 2005-2009 hanya satu provinsi yaitu provinsi jawa timur, sedangkan propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Banten tingkat efisiensinya fluktuatif setiap tahunnya. Propinsi yang memiliki inefisien atau <100%, terjadi karena pemborosan dalam menggunakan input maka solusinya propinsi tersebut harus mengurangi penggunaan jumlah inputnya dengan tetap mempertahankan jumlah output yang sudah dihasilkan.

Sugama (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Riau (Tahun 2002-2006) menyatakan bahwa: (1) kabupaten yang mampu mencapai dan mempertahankan tingkat efisiensi 100% selama tahun 2002-2006 hanya dua kabupaten dari sebelas kabupaten yang ada. (2) penelitian ini hanya menyoroti sisi input sehingga sumber inefisiensi terdapat pada input dengan tingkat output yang sudah dihasilkan dan dipertahankan. Sumber-sumber inefisiensi terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pengeluaran pemerintah. Jadi apabila kabupaten yang memiliki inefisiensi dan pencapaian efisiensinya kurang dari 100% maka solusisnya kabupaten tersebut harus mengurangi inputnya atau sumber inefisiensinya dengan mempertahankan tingkat output.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian dan Konsep Efisiensi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efisiensi yaitu tepat sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepat guna (http://kamusbahasaindonesia.org/efisiensi).

Dalam menganalisis suatu perekonomian, kita terutama memusatkan perhatian pada konsep efisiensi alokatif atau efisiensi (kadang-kadang disebut efisiensi Pareto atau Optimalisasi Pareto). Suatu perekonomian adalah efisien apabila ia menyediakan bagi para konsumennya sekumpulan barang dan jasa yang paling diinginkan, dengan sumber daya-sumber daya dan teknologi tertentu dari perekonomian (Samuelson & Nordhaus, 2003).

Lebih lanjut lagi menurut pendapat Samuelson & Nordhaus (2003), efisiensi alokatif (atau efisiensi) dapat terjadi apabila tidak ada kemungkinan reorganisasi produksi yang dapat membuat seseorang dalam keadaan lebih baik tanpa membuat seseorang yang lain dalam keadaan yang lebih buruk. Dalam kondisi-kondisi efisiensi alokatif, kepuasan atau utilitas satu orang dapat ditingkatkan hanya dengan menurunkan utilitas seseorang yang lain.

Sebuah sistem ekonomi yang efisien dapat memberi lebih banyak barang dan jasa bagi masyarakat tanpa menggunakan lebih banyak sumber daya. Dalam ekonomi pasar secara umum diyakini akan lebih efisien dibandingkan dengan alternatif lainnya yang pertama mendasar dalil kesejahteraan berdasarkan penyediaan kepercayaan oleh karena itu bagi yang menyatakan bahwa setiap

pasar berkeseimbangan sempurna berdasarkan kompetitif adalah efisien (tetapi hanya ada bila tidak teradi ketidaksempurnaan pasar). Kebijakan reformasi dalam ekonomi mikro adalah bertujuan membuat kebijakan yang mengurangi distorsi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi. Namun, tidak ada teori dasar yang jelas bahwa dengan menghapus distorsi pasa maka akan selalu dapat meningkatkan efisiensi ekonomi.

2.2.2 Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, sosial, dan hukum) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2009).

Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam arti luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan membicarakan metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan (Bastian, 2001).

2.2.3 Efisiensi Sektor Publik

Dalam penyediaan layanan publik perlu adanya efisiensi. Maksud dari efisiensi layanan publik tersebut adalah bagaimana suatu pemerintah daerah dapat

menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini keuangan daerah secara akurat dan optimal, untuk kemudian menghasilkan sejumlah output atau layanan publik (Chusnah, 2014).

Menurut pendapat Antony dan Herzlinger dalam Susilo (2013), menyatakan bahwa sektor publik disediakan dengan tujuan untuk menghasilkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kinerja sektor publik sendiri dapat dilihat dengan tolak ukur berapa banyak pelayanan yang diberikan dan disediakan untuk masyarakat serta bagaimana kualitas dari pelayanan yang disediakan.

2.2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (01 Januari – 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Sumber penerimaan negara dapat diartikan sebagai penerimaan APBN yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu:

2.2.4.1 APBN berdasarkan Sumber Penerimaan

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Herlina Rahman, 2005).

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Kuncoro 2014). Menurut Adisasmita (2014), dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut adalah saling mengisi dan melengkapi.

c) Pendapatan Lain-lain Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain adalah hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Adisasmita, 2014).

2.3 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan tekhnologi, penambahan pengetahuan, penigkatan

keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen (Sadono sukirno, 1996)

Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk di dalam struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja (Widodo, 2006).

Menurut Rostow dalam Arsyad (2004), proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisonal (*the traditional society*), prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take off*), tinggal landas (*the take-off*), menuju kedewasaan (*the drive to maturity*), dan masa konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*). Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multi-dimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja.

Selanjutnya menurut Rostow dalam Arsyad (2004), disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain:

1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil.
3. Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif.

Perubahan sikap hidup dan adat istiadat kurang merangsang pembangunan ekonomi (misalnya perubahan sikap yang tadinya kurang mengahargai waktu, kurang menghargai prestasi perorangan, dan sebagainya).

2.3.1 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (2011), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Menurut Adisasmita (2014), alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah:

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah.

2. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

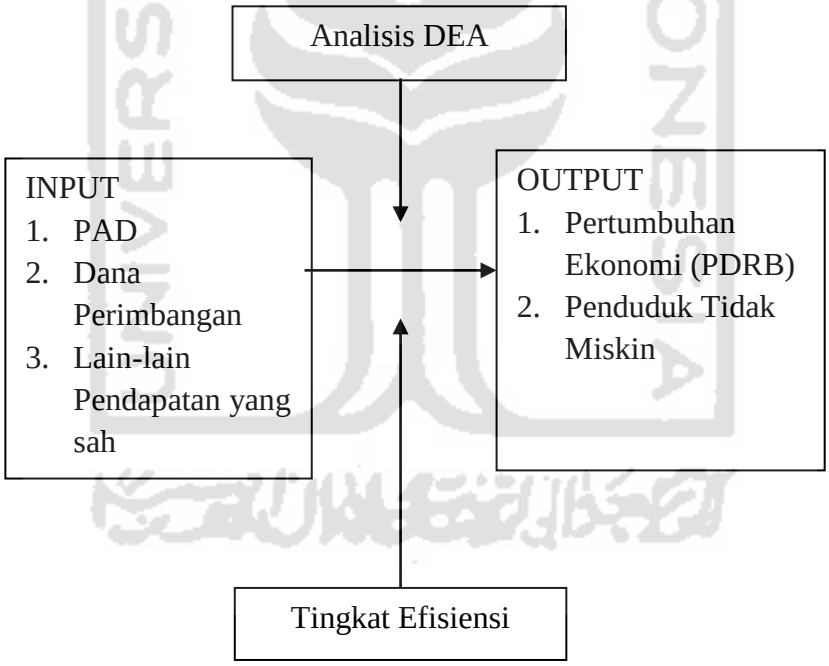
Selanjutnya menurut Adisasmita (2014), untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi data PDRB adalah data PDRB atas dasar harga konstan, artinya pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada suatu periode tertentu. Tanpa memperhitungkan tekanan inflasi, PDRB selain dapat digunakan untuk perhitungan pertumbuhan ekonomi, bermanfaat pula untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dihitung dengan menggunakan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena pertumbuhan PDRB dapat saja terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat daripada tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan PDRB.

2.3.2 Kemiskinan

Hall dan midgley (2004), menyatakan kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup dibawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi setiap penduduk miskin (BPS, 2013).

2.4 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh instansi atau organisasi yang bukan pengelolanya, dan laporan tahunan yang ada di daerah setempat. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa instansi atau sumber-sumber data lainnya berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Pertumbuhan Ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Kemiskinan.

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Metode analisis dengan menggunakan DEA memerlukan data yang berupa input dan output suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Input dan output yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Variabel Input

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Merupakan pendapatan daerah yang dapat diperoleh dari daerah itu sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

   Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

   Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Variabel Output

1. PDRB

   Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan oleh berbagai unit produksi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dan dihitung menurut harga konstan tahun 2010. Data yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010. PDRB diukur dalam satuan jutaan rupiah.

2. Kemiskinan

   Merupakan sebuah kondisi ketika orang mengalami berbagai ancaman yang mengancam kesejahteraan mereka, seperti ketidakcukupan konsumsi makanan, kerentanan, pendidikan yang terbatas, ketidakmampuan mendapatkan pelayanan dasar kesehatan. Data analisis yang digunakan jumlah penduduk tidak miskin

3.3 Metode Analisis Data Penelitian

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA dalah sebuah metode operasional matematika yang mengukur efisiensi teknik suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak input dan banyak output lalu membandingkan secara relatif terhadap UKE yang lain.

3.3.1 Konsep Dasar *Data Envelopment Analysis* (DEA)

Data Envelopment Analysis dapat mengatasi keterbatasan yang dimiliki analisis rasio persial dan regresi berganda. DEA merupakan prosedur yang dirancang secara khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak input dan banyak output, dimana penggabungan input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan. Efisiensi relatif suatu UKE adalah efisiensi suatu UKE dibanding dengan UKE lain dalam sampel yang menggunakan input dan output yang sama.

Dalam DEA, efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input.

3.3.2 Nilai Manajerial DEA

DEA memiliki beberapa nilai manajerial. Pertama, DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE, relatif terhadap UKE yang lain pada sampel. Kedua, jika suatu UKE kurang efisien (efisiensi<100%), DEA menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna (*efficient reference set*, efisiensi=100%) dan angka pengganda (*multipliers)* yang dapat digunakan oleh manajer untuk menyusun strategi perbaikan.

Ketiga, DEA menyediakan metrik efisiensi silang. Efisiensi silang UKE A terhadap UKE B merupakan rasio dari output tertimbang dibagi input tertimbang yang dihitung dengan menggunakan tingkat input dan output UKE A dan bobot input dan output UKE B.

3.3.3 Formulasi DEA

Penerapan program linear pada DEA. Misal, kita akan membandingkan efisiensi dari sejumlah UKE, misalkan *n*. Setiap UKE menggunakan *m* jenis input yang menghasilkan *s* jenis output. Misal, Misalnya $X_{ij}>0$ merupakan jumlah input *i* yang digunakan oleh UKE *j*, dan misalkan $Y_{rj}>0$ merupakan jumlah output *r* yang dihasilkan oleh UKE *j*. Variabel keputusan (decision variabel) dari kasus tersebut adalah bobot yang harus diberikan pada setiap input dan output oleh UKE *k*. Vik adalah bobot yang diberikan pada input *i* oleh unit kegiatan *k* dan U_{rk} adalah bobot yang diberikan pada output *r* oleh UKE *k*. Sehingga V_{ik} dan U_{rk} merupakan variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan melalui interaksi program linear fraksional (*fractional linear programs*), suatu formulasi program linear untuk setiap UKE dalam sampel. Fungsi tujuan *(objective function)* dari setiap program linear fraksional tersebut adalah rasio dari output tertimbang total *(total weighted output)* dari UKE *k* dibagi dengan input tertimbang totalnya.

Formulasi fungsi tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Maksimumkan } Z_k = \frac{\sum_{r=1}^{s} U_{rk}.Y_{rk}}{\sum_{i=1}^{m} V_{ik}.X_{ik}}$$

Kriteria universalitas mensyaratkan UKE *k* untuk memiliki bobot dengan batasan atau kendala bahwa tidak ada satu UKE lain yang akan memiliki efisiensi lebih besar 1 atau 100%, jika UKE lain tersebut menggunakan bobot yang dipilih oleh UKE *k* sehingga formulasi selanjutnya adalah:

$$\frac{\sum_{r=1}^{s} U_{rk}.Y_{rj}}{\sum_{i=1}^{m} V_{ik}.\mathrm{X}_{ij}} \leq 1 \; ; \; j = 1, \dots, n$$

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif:

$$U_{rk} \geq 0 \; ; \; r = 1, \dots, s$$

$$V_{ik} \geq 0 \; ; \; r = 1, \dots, m$$

Program linear fraksional kemudian ditransformasikan ke dalam program linear biasa (*ordinary linear program*), dan metode simpleks dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Transformasi program linear, yang disebut dengan DEA (*data envelopment analysis*), adalah sebagai berikut:

DEA memaksimumkan $\mathrm{Z_k} = \sum_{r=1}^{s} U_{rk}.Y_{rk}$

Dengan batasan atau kendala :

$$[P_{kj}] \quad \sum_{r=1}^{s} U_{rk}.Y_{rj} - \sum_{i=1}^{m} V_{ik} \,.\, \mathrm{X}_{ij} \leq 0 \; ; \; j = 1, \dots, n$$

$$[q_k] \quad \sum_{i=1}^{m} V_{ik}.X_{ik} = 1$$

$$U_{rk} \geq 0 \; ; \; r = 1, \dots, s$$

$$V_{ik} \geq 0 \; ; \; r = 1, \dots, m$$

3.3.4 Kelebihan dan Kelemahan DEA

Metode ini dikembangkan oleh Chames, Cooper dan Rhodes (1978) untuk mengatasi kesulitan pengukuran efisiensi relatif dengan keberadaan *multiple* input dan output. DEA memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan teknik pengukuran kinerja lainnya.

Kelebihan DEA antara lain:

a. Dapat mengidentifikasikan efisiensi dari berbagai Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) dengan berbagai variabel input dan output.
b. Mampu mengidentifikasi sumber-sumber inefisiensi secara spesifik sehingga diperoleh informasi secara rinci pada masing-masing UKE
c. DEA dapat memberi arah pada UKE yang tidak efisien untuk meningkatkan efisiensinya melalui kegiatan *benchmarking* terhadap UKE yang efisien (*Efficient Reference Set*).
d. Dari hasil pertama dan kedua dapat disusun strategi pengembangan suatu UKE sehingga mencapai kinerja yang optimal.
e. Jika menggunakan analisis rasio, tidak dapat memberi informasi yang konklusif mengenai UKE yang efisien, serta tidak dapat memberi arahan pada usaha peningkatan efisiensi.
f. Analisis regresi memiliki kelemahan pada penggabungan output yang sejenis dan kualitasnya mungkin berbeda, serta pengukuran efisiensi dihitung secara relatif terhadap kinerja rata-rata. Sedangkan DEA dapat menghitung efisiensi secara relatif terhadap kemungkinan kinerja yang terbaik, dan tidak memerlukan penggabungan output.

Kelemahan DEA antara lain:

a. Diperlukannya pemahaman yang mendalam terhadap variabel dan karakteristik UKE yang digunakan. Kesalahan peneliti dalam memahami karakteristik tersebut bisa berakibat pada kesalahan interpretasi.
b. DEA mensyaratkan semua input dan output harus spesifik dan dapat diukur. Kesalahan dalam memasukkan input dan output yang valid akan memberikan hasil yang bias.
c. Model DEA sangat sensitif terhadap nilai ekstrim.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Pendapatan Regional

Pendapatan regional merupakan alat untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat suatu daerah. Pendapatan regional bermanfaat untuk mengetahui tingkat perekonomian makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah dalam satu periode dan menggambarkan tingkat kemiskinan suatu daerah. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi regional dapat digambarkan dengan produk regional domestik bruto (PDRB) dan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat, bisa dengan melihat indikator jumlah penduduk miskin.

4.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber berkompeten, seperti data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya yang yang terkait dan relevan dengan objek yang diteliti dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tabel 4.1

PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2010-2014

(Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB				
	2010	2011	2012	2013	2014*
Yogyakarta	17,202,154	18,206,089	19,189,074	20,239,557	21,312,143
Sleman	21,481,644	22,645,851	23,957,112	25,367,414	26,740,537
Bantul	12,114,059	12,728,666	13,407,021	14,138,719	14,867,407
Kulonprogo	5,033,073	5,246,146	5,475,148	5,741,660	5,992,787
Gunungkidul	8,848,037	9,248,010	9,695,979	10,177,432	10,639,465

Sumber : BPS
Catatan : (*) Angka Sementara

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kabupaten dengan PDRB tertinggi adalah Kabupaten Sleman. PDRB Kabupaten Sleman setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2010 sebesar 21,481,644 sampai dengan tahun 2014 menjadi sebesar 26,740,537 Sedangkan Kabupaten dengan tingkat PDRB terendah adalah Kabupaten Kulonprogo yang pada tahun 2010 sebesar 5,033,073 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2014 sebesar 5,992,787.

4.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketika orang mengalami berbagai ancaman yang mengancam kesejahteraan mereka, seperti ketidakcukupan konsumsi makanan, kerentanan, pendidikan yang terbatas, ketidakmampuan mendapatkan pelayanan dasar kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan ekonomi, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai kehidupan. Jumlah penduduk miskin merupakan tolak

ukur dari pembangunan ekonomi. Semakin rendah angka penduduk miskin menunjukkan pembangunan ekonomi mengalami peningkatan.

Tabel 4.2

Penduduk Tidak Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tidak Miskin				
	2010	2011	2012	2013	2014*
Yogyakarta	350,872	352,853	356,412	365,309	371,304
Sleman	976,110	990,004	998,033	1,023,484	1.052,404
Bantul	764,603	761,863	769,256	787,866	759,917
Kulonprogo	298,769	297,407	300,821	310,003	332,803
Gunungkidul	526,682	520,989	528,240	542,392	601,057

Sumber : BPS
Catatan : (*) Angka Sementara

4.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri yang berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan undang-undang. Maka pemerintah daerah melakukan pungutan untuk mengumpulkan dana, guna keperluan daerah membiayai kegiatannya. Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Tabel 4.3

PAD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2010-2014

(Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	PAD				
	2010	2011	2012	2013	2014
Yogyakarta	179,423,942	228,870,562	338,839,606	383,052,140	92,815,160
Sleman	163,056,459	226,686,250	301,069,539	449,270,306	383,497,912
Bantul	81,637,099	128,896,456	166,597,778	224,197,864	265,128,265
Kulonprogo	48,589,685	53,752,294	74,028,644	95,991,513	92,815,160
Gunungkidul	45,542,031	54,462,419	67,050,782	83,427,448	90,333,149

Sumber : BPS
Catatan : (*) Angka Sementara

4.1.3.1 Pajak Daerah

Sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh negara (pusat). Di samping itu ada ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki objek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif pajak daerah ditentukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

4.1.3.2 Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah

retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan/badan. Jadi dalam hal retribusi daerah, balas jasa atas adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan di mana retribusi jalan tersebut dipungut. Demikian juga retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi lainnya.

4.1.3.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 dana perimbangan berasal dari bagi hasil pusat dan daerah yaitu PBB, BPHTB, sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Tabel 4.4

Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2010-2014

(Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan				
	2010	2011	2012	2013	2014*
Yogyakarta	484,628,283	500,613,750	602,310,072	658,770,939	120,406,677
Sleman	740,198,028	753,889,010	964,821,049	992,782,430	1,048,511,114
Bantul	688,676,567	717,123,250	885,352,411	938,492,078	1.042,469,209
Kulonprogo	485,094,125	522,276,920	612,419,550	681,454,833	706,469,822
Gunungkidul	633,692,367	667,004,719	799,932,048	877,414,789	932,934,542

Sumber : BPS
Catatan : (*) Angka Sementara

4.1.3.3.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Propinsi tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah provinsi yang bersangkutan. Porsi daerah provinsi ini merupakan persentase bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia.

4.1.3.3.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN. Yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah

daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.

Sektor kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi khusus meliputi biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya perjalanan pegawai daerah dan lain-lain biaya umum yang sejenis.

4.1.3.4 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang sah antara lain hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 4.5
Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY
Tahun 2010-2014
(Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Lain-lain Pendapatan yang Sah				
	2010	2011	2012	2013	2014
Yogyakarta	151,444,002	22,197,122	216,832,386	267,757,215	120,406,677
Sleman	192,374,400	330,861,267	341,832,386	457,472,901	437,783,710
Bantul	216,533,235	334,527,406	285,620,536	357,612,754	380,387,984
Kulonprogo	99,714,152	215,797,424	196,138,450	225,732,876	231,838,962
Gunungkidul	122,014,477	244,359,095	209,519,165	281,250,438	271,939,312

Sumber : BPS
Catatan : (*) Angka Sementara

4.2 Analisis Data dan Pembahasan

Pembangunan ekonomi regional merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental struktur ekonomi suatu daerah, untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi ada berbagai kebijakan yang dilakukan diantaranya dapat digolongkan kebijakan fiskal daerah atau pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola keuangannya. Melalui kebijakan ini pemerintah mengelola keuangan tersebut untuk mencapai keberhasilan pembangungan ekonomi daerah. Ada beberapa indikator yang diamati yaitu struktur penerimaan, pengeluaran dan dampak terhadap pembangunan ekonomi regional.variabel yang dipilih berdasarkan besarnya peranan terhadap kapasitas keuangan daerah dan dampak terhadap perekonomian daerah, lalu kedekatan antara hubungan variabel. Artinya variabel input dianggap sangat erat hubungannya dengan pencapaian variabel output.

Variabel output yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil berdasarkan harga konstan 2000 menjelaskan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
2) Jumlah penduduk tidak miskin sebagai variabel yang mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi.

Sedangkan variabel input meliputi:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2) Dana Perimbangan

   Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

   Lain-lain Pendapatan yang sah antara lain hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran efisiensi berdasarkan pada programasi linier yang membandingkan input dan output. Penelitian ini di mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Dari hasil perhitungan dengan teknik DEA diperoleh tabel efisiensi untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tabel 4.6

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

(Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Yogyakarta	100	100	100	100	100
Sleman	100	100	100	100	100
Bantul	100	100	100	100	85,37
Kulonprogo	66,63	54,90	67,04	67,58	68,23
Gunungkidul	100	85,91	100	100	100

Sumber: BPS diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, Kabupaten/Kota yang mampu mempertahankan tingkat pengelolaan keuangan yang efisien (100%) selama lima tahun ada dua yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sedangkan dua kabupaten yaitu Kabupaten Bantul pada tahun 2014 tidak mencapai tingkat pengelolaan keuangan yang efisien dan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2011. Dan untuk Kabupaten Kulonprogo tidak pernah mencapai tingkat pengelolaan keuangan yang efisien selama lima tahun tersebut.

Berdasarkan tabel 4.6, pada tahun 2010 tingkat efisien Kabupaten Kulonprogo hanya mencapai 66,63% maka Kabupaten Kulonprogo dapat mengurangi penggunaan dana setiap inputnya sebesar 33,37% dengan mempertahankan tingkat output yang sudah dihasilkan. Untuk mencapai tingkat efisiensi 100% maka Kabupaten Kulonprogo seharusnya menggunakan PAD sebesar Rp. 32.377.061.600; menggunakan dana perimbangan sebesar Rp. 323.235.731.800; dan menggunakan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 66.443.140.100. Oleh sebab itu, selama ini Kabupaten Kulonprogo mengalami pemborosan penggunaan input PAD sebesar Rp. 16.212.623.400; dana

perimbangan sebesar Rp. 161.858.393.200; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 66.443.140.100. Dengan demikian, Kabupaten Kulonprogo tidak mampu mencapai tingkat efisiensi dikarenakan terjadi pemborosan dalam penggunaan setiap inputnya.

Berdasarkan tabel 4.6, pada tahun 2011 dua Kabupaten dengan tingkat efisiensi <100% yaitu Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul dengan tingkat efisiensi paling rendah adalah Kabupaten Kulonprogo sebesar 54,90% sedangkan Kabupaten Gunungkidul sebesar 85,91% berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya yang mampu mencapai tingkat efisiensi 100%. Maka Kabupaten Kulonprogo dapat mengurangi penggunaan setiap inputnya sebesar 45,10% dengan mempertahankan tingkat output yang sudah dihasilkan. Dengan demikian, untuk mencapai tingkat efisiensi 100% maka Kabupaten Kulonprogo dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 29.511.856.900; dana perimbangan sebesar Rp. 259.188.482.900; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 118.480.202.700. Demikian juga dengan Kabupaten Gunungkidul, untuk mencapai tingkat efisien 100% maka Kabupaten Gunungkidul dapat mengurangi penggunaan setiap inputnya sebesar 14,09% dengan mempertahankan tingkat output yang sudah dihasilkan. Dengan demikian Kabupaten Gunungkidul dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 46.790.448.900; dana perimbangan sebesar Rp. 458.112.423.500; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 20.993.690.600. Oleh sebab itu, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul tidak mampu mencapai tingkat efisiensi dikarenakan terjadi pemborosan dalam penggunaan setiap inputnya.

Berdasarkan tabel 4.6, pada tahun 2012 Kabupaten Kulonprogo hanya mencapai tingkat efisiensi sebesar 67.04% berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya yang mampu mencapai tingkat efisiensi 100%. Maka, Kabupaten Kulonprogo dapat mengurangi penggunaan setiap inputnya sebesar 32.96% dengan mempertahankan tingkat output yang sudah dihasilkan. Dengan demikian, untuk mencapai tingkat efisiensi 100% maka Kabupaten Kulonprogo dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 49.626.801.200; dana perimbangan sebesar Rp. 410549507.200; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 116.042.209.300. Oleh karena itu, Kabupaten Kulonprogo tidak mampu mencapai tingkat efisiensi dikarenakan pemborosan dalam penggunaan setiap inputnya.

Berdasarkan tabel 4.6, pada tahun 2013 Kabupaten dengan tingkat efisiensi paling rendah adalah Kabupaten Kulonprogo dengan tingkat efisiensi sebesar 67.58% maka Kabupaten Kulonprogo dapat mengurangi penggunaan setiap inputnya sebesar 32.42% dengan mempertahankan tingkat output yang sudah dihasilkan. Dengan demikian, untuk mencapai tingkat efisiensi 100% maka Kabupaten Kulonprogo dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 64.866.892.900; dana perimbangan sebesar Rp. 446.601.202.600; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 15.254.046.800. Penyebab terjadinya inefisiensi pada Kabupaten Kulonprogo adalah pemborosan penggunaan input PAD sebesar Rp. 31.124.620.100; dana perimbangan Rp. 234.853.630.400; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 7.319.240.800.

Berdasarkan tabel 4.6, pada tahun 2014 dua Kabupaten dengan tingkat efisiensi <100% yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kuloprogo dengan

tingkat efisiensi paling rendah adalah Kabupaten Kulonprogo sebesar 68.23% sedangkan Kabupaten Bantul sebesar 85.37% berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya yang mampu mencapai tingkat efisiensi 100%. Maka Kabupaten Bantul dapat mengurangi penggunaan setiap inputnya sebesar 14.63% dengan mempertahankan tingkat output yang sudah dihasilkan. Dengan demikian, untuk mencapai tingkat efisiensi 100% maka Kabupaten Bantul dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 226.331.550.500; dana perimbangan sebesar Rp. 88.426.326.400; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 324.725.099.400. Demikian juga dengan Kabupaten Kulonprogo, untuk mencapai tingkat efisien 100% maka Kabupaten Kulonprogo dapat mengurangi penggunaan setiap inputnya sebesar 31.77% dengan mempertahankan tingkat output yang sudah dihasilkan. Dengan demikian Kabupaten Kulonprogo dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 63.326.031.300; dana perimbangan sebesar Rp. 482.011.021.100; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 148.306.042.600. Oleh sebab itu, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo tidak mampu mencapai tingkat efisiensi dikarenakan terjadi pemborosan dalam penggunaan setiap inputnya.

Inefisiensi yang terjadi terhadap Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2011, Kabupaten Bantul pada tahun 2014 dan setiap tahunnya terhadap Kabupaten Kulonprogo dikarenakan pemborosan penggunaan input. Pada tabel 4.7 di bawah ini akan menjelaskan pemborosan yang menyebabkan inefisiensi pada Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo

Tabel 4.7

Penggunaan Input yang Efisien pada Tingkat Output yang Dihasilkan dan Pemborosan

(Ribu Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota	Penggunaan Input yang Efisien			Pemborosan		
		PAD	DP	LPS	PAD	DP	LPS
2010	Kulonprogo	32377061.7	323235731	66443140.1	16212623.4	161858393	33271011.9
2011	Kulonprogo	29511856.9	259188482.9	118480202.7	24240437.1	263088437.1	97317221.3
2011	Gunungkidul	46790448.9	458112423.5	209936906	7671970.1	208892295.5	34422189
2012	Kulonprogo	49626801.2	410549507.2	116042209.3	24401842.8	201870042.8	80096240.7
2013	Kulonprogo	64866892.9	446601202.6	152540468	31124620.1	234853630.4	73192408
2014	Bantul	226331550.5	888426326.4	324725099.4	38796714.5	154042882.6	55662884.6
2014	Kulonprogo	63326031.3	482011021.1	148306042.6	29489128.7	224458800.9	83532919.4

Sumber: BPS diolah

Catatan : Lampiran II diolah

Pemborosan yang dimaksud adalah penggunaan input yang besar dan tidak maksimal sehingga menghasilkan output yang tidak maksimal juga, atau input yang digunakan untuk keperluan yang tidak dapat mempengaruhi output.

Berdasarkan perhitungan *Data Envelopment Analysis* (DEA), juga memperlihatkan bahwa kabupaten-kabupaten tidak efisien mempunyai nilai *efficient reference set* atau kabupaten-kabupaten lain yang dijadikan acuan/*benchmark* dalam meningkatkan efisiensinya. Berikut adalah ringkasan dari efisiensi, *effiecient reference set* dan *multiplier* dari seluruh kabupaten/kota di Yogyakarta.

Pada tabel 4.8 di bawah ini dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota yang tingkat input dan outputnya tidak efisien dapat mengacu pada *efficient reference set*, sehingga dapat ditentukan input dan output provinsi yang efisien untuk provinsi yag tidak efisien.

Tabel 4.8

Multiplier, Efisiensi dan *Efficient Reference Set* dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Tidak Efisien pada Tahun 2010-2014

Tahun	Kabupaten/Kota	Efisiensi (%)	Efficient Reference	Multiplier
2010	Kulonprogo	66,63	Sleman	0,083
			Bantul	0,001
			Gunungkidul	0,412
2011	Kulonprogo	54,90	Sleman	0,117
			Bantul	0,239
	Gunungkidul	85,91	Sleman	0,181
			Bantul	0,449
2012	Kulonprogo	67,04	Sleman	0,010
			Bantul	0,142
			Gunungkidul	0,345
2013	Kulonprogo	67,58	Sleman	0,004
			Bantul	0,155
			Gunungkidul	0,338
2014	Bantul	85,37	Sleman	0,498
			Gunungkidul	0,393
	Kulonprogo	68,23	Sleman	0,59
			Gunungkidul	0,450

Sumber : BPS diolah
Catatan : Lampiran III diolah

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, pada tahun 2010 tingkat efisiensi Kabupaten Kulonprogo sebesar 66,63% dengan *benchmark* yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* 0,083; 0,001 dan 0,412. Nilai *multiplier* berfungsi untuk mengetahui daerah atau variabel yang berpengaruh besar terhadap tingkat pendapatan daerah. Dari hasil pengolahan data menggunakan DEA, Kabupaten Kulonprogo untuk mencapai tingkat efisiensi 100% jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul maka dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 32.377.061.700; dana perimbangan sebesar Rp.

323.235.731.800; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 66.443.140.100. Dengan menggunakan masing-masing input yang telah dikurangi maka Kabupaten Kulonprogo dapat mencapai tingkat efisiensi 100%.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, pada tahun 2011 tingkat efisiensi Kabupaten Kulonprogo sebesar 54,90% dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 85,91% dengan *benchmark* untuk Kabupaten Kulonprogo yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* 0,117 dan 0,239. Dari hasil pengolahan data menggunakan DEA, Kabupaten Kulonprogo untuk mencapai tingkat efisiensi 100% jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul maka dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 29.511.856.900; dana perimbangan sebesar Rp. 259.188.482.900; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 118.480.202.700. Demikian juga dengan Kabupaten Gunungkidul dengan *benchmark* untuk Kabupaten Gunungkidul yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* 0,181 dan 0,449. Dari hasil pengelolaan data menggunakan DEA, Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tingkat efisiensi 100% jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul maka dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 46.790.448.900; dana perimbangan sebesar Rp. 458112423.500; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 20.993.690.600. Dengan menggunakan masing-masing input yang telah dikurangi maka Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul dapat mencapai tingkat efisiensi 100%.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, pada tahun 2012 tingkat efisiensi Kabupaten Kulonprogo sebesar 67,04% dengan *benchmark* yaitu Kabupaten Sleman,

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* 0,010, 0,147 dan 0,345. Dari hasil pengolahan data menggunakan DEA, Kabupaten Kulonprogo untuk mencapai tingkat efisiensi 100% jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul maka dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 49.626.801.200; dana perimbangan sebesar Rp. 410.549.507.200; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 116.042.209.300. Dengan menggunakan masing-masing input yang telah dikurangi maka Kabupaten Kulonprogo dapat mencapai tingkat efisiensi 100%.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, pada tahun 2013 tingkat efisiensi Kabupaten Kulonprogo sebesar 67,58% dengan *benchmark* yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* 0,004, 0,155 dan 0,338. Dari hasil pengolahan data menggunakan DEA, Kabupaten Kulonprogo untuk mencapai tingkat efisiensi 100% jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul maka dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 64.866.892.900; dana perimbangan sebesar Rp. 446.601.202.600; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 15.254.046.800. Dengan menggunakan masing-masing input yang telah dikurangi maka Kabupaten Kulonprogo dapat mencapai tingkat efisiensi 100%.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, pada tahun 2014 tingkat efisiensi Kabupaten Bantul sebesar 85.37% dan Kabupaten Kulonprogo sebesar 68.23% dengan *benchmark* untuk Kabupaten Bantul yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten

Gunungkidul yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* 0,498 dan 0,393. Dari hasil pengolahan data menggunakan DEA, Kabupaten Bantul untuk mencapai tingkat efisiensi 100% jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul maka dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 226.331.550.500; dana perimbangan sebesar Rp. 888.426.326.400; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 324.725.099.400. Demikian juga dengan Kabupaten Gunungkidul dengan *benchmark* untuk Kabupaten Kulonprogo yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* 0,059 dan 0,450. Dari hasil pengelolaan data menggunakan DEA, Kabupaten Kulonprogo untuk mencapai tingkat efisiensi 100% jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul maka dapat menggunakan PAD sebesar Rp. 63.326.031.300; dana perimbangan sebesar Rp. 482.011.021.100; dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 148.306.042.600. Dengan menggunakan masing-masing input yang telah dikurangi maka Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo dapat mencapai tingkat efisiensi 100%.

Tabel 4.9

Penggunaan Input yang Efisien pada Tingkat Output yang Dihasilkan dengan Perbandingan Kabupaten/Kota yang Efisien (*Benchmark*)

(Ribu Rupiah)

Tahun	Kabupaten/Kota	PAD	DP	LPS
2010	Kulonprogo	32377061.7	323235731.8	66443140.1
2011	Kulonprogo	29511856.9	259188482.9	118480202.7
	Gunungkidul	46790448.9	458112423.5	209936906
2012	Kulonprogo	49626801.2	410549507.2	116042209.3
2013	Kulonprogo	64866892.9	446601202.6	152540468
2014	Bantul	226331550.5	888426326.4	324725099.4
	Kulonprogo	63326031.3	482011021.1	148306042.6

Sumber : BPS Diolah
Catatan : Lampiran III Diolah

Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul merupakan tiga Kabupaten yang tidak mencapai tingkat efisiensi 100% dibandingkan dengan dua kabupaten/kota lainnya selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2010 Kabupaten Kulonprogo mencapai tingkat efisiensi 66,63%, tahun 2011 dua Kabupaten antara lain Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan tingkat efisiensi masing-masing menjadi 54,90% dan 85,91%, lalu pada tahun 2012 Kabupaten Kulonprogo mampu meningkatkan tingkat efisiensinya menjadi 67,04%, pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan menjadi 67,58%, namun pada tahun 2014 Kabupaten Bantul mengalami penurunan tingkat efisien 85,37%, berbeda dengan Kabupaten Kulonprogo yang kembali mengalami peningkatan menjadi 68,23%.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA) terhadap tingkat efisiensi sektor publik kabupaten/kota di Yogyakarta pada tahun 2010-2014, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan merupakan variabel input yang paling berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat efisiensi PAD dan dana perimbangan pada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman pada tahun 2010-2014 adalah 100%. Sedangkan Kabupaten gunung kidul mengalami inefisiensi pada tahun 2011 pada angka 85,91%, Kabupaten Bantul pada tahun 2014 pada angka 85,37% dan Kabupaten Kulonprogo mengalami inefisiensi dengan nilai yang berfluktuasi pada angka 55% - 69%.
2. Lain-lain pendapatan yang sah adalah variabel input yang cukup berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tingkat efisiensi lain-lain pendapatan yang sah pada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman pada tahun 2010-2014 adalah 100%. Sedangkan Kabupaten gunung kidul mengalami inefisiensi pada tahun 2011 pada angka 85,91%, Kabupaten Bantul pada tahun 2014 pada angka 85,37% dan Kabupaten Kulonprogo mengalami inefisiensi dengan nilai yang berfluktuasi pada angka 55% - 69%.Kulonprogo mengalami inefisiensi dengan nilai yang berfluktuasi pada angka 59% - 68%.

5.2 Implikasi

Kabupaten/kota yang sudah mencapai tingkat efisiensi maksimal diharapkan dapat mempertahankannya demi kemajuan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk Kabupaten Kulonprogo yang mengalami inefisiensi diharapkan agar mampu menekan penggunaan inputnya dan mengimbangi output. Jika dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah (PAD) memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Kabupaten Kulonprogo dengan kabupaten/kota besar lainnya yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat sumber daya yang bisa dieksplorasi oleh masing-masing kabupaten/kota tersebut. Namun, pada tahun 2011 Kabupaten Gunungkidul mengalami pemborosan input dan pada tahun 2014 Kabupaten Bantul yang mengalami pemborosan input. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perbedaan jumlah input yang signifikan dengan kabupaten/kota lain bukanlah sebuah hambatan untuk mendapatkan output yang maksimal. Hal yang perlu dilakukan adalah mengawasi dan mengevaluasi penggunaan setiap input agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana ataupun pemborosan yang dapat mengakibatkan inefisiensi. Selain itu, diperlukan juga penyusunan rencana penggunaan dana input terhadap sektor-sektor yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan agar pada masa yang akan datang mampu mencapai tingkat efisiensi 100%.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Abidin, Zainal. 2007. *Kinerja Efisiensi Pada Bank Umum.* Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: STIE Perbanas.

Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.

Apriesa, Lintantia Fajar dan Miyasto. 2013. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan *(Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)". Journal of Economics* Vol. 2, No. 1.

Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.* Yogyakarta: BPFE.

Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* Yogyakarta: BPFE UGM.

BPS. 2011. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2007-2011*. BPS Yogyakarta.

_____. 2013. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota*. BPS Yogyakarta.

_____. 2014. *DIY Dalam Angka*. BPS Yogyakarta.

Chusnah, Saidatul. 2014. Efisiensi Sektor Publik dan Kinerja Ekonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah FEB UB.* Vol.2 No.2

Hadad, M. D., Wimboh S., Daniel., Euginea, M. 2003. *Analisis Efisiensi Industri Perbankan Syariah: Penggunaan Metode Nonparametrik Data Envelopment Analysis (DEA).* Bank Indonesia Researh Paper. Jakarta.

Kemenkeu (2014). *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2014*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah, Edisi 3. Jakarta: Erlangga.*

Kurnia, Akhmad Syakir. 2006. Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH*). Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11, No. 2.*

Mardiasmo. 1997. *Perpajakan.* Yogyakarta: Penerbit Andi.

_____. Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Prakoso. 2011. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Terhadap Belanja Daerah". *Skrips*i S1 FEB UNDIP.

Putra, Aditya Nugraha. 2013. "*Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"*. *Skripsi* S1 FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Sekretaris Negara.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2003. *Ilmu Mikro Ekonomi, Edisi17*. Alih bahasa oleh Nur Rosyidah, Anna Elly, dan Bosco Carvallo. Jakarta: P.T. Media Global Edukasi

Sugama, Fiji. 2009. "*Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Propinsi Riau (Tahun 2002-2006)"*. *Skripsi* S1 FE UII.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Susan, Ai. 2011. *Efisieni Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Propinsi di Pulau Jawa (Tahun 2005-2009). Skripsi* S1 FE UII.

Suseno, Priyonggo. 2008. Analisis Efisiensi dan Skala Ekonomi pada Industri Perbankan Syarih di Indonesia. *Journal of Islamic and Economic*. Vol.2 No.1

Susilo, Wibisono Soko. 2013. "*Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2011). Skripsi* S1 FEB UNDIP.

Tambunan, Tulus T.H. 2012. *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.* Jilid I. Jakarta: Erlangga.

Tukiran, *et.al*., eds. 2007. *Sumber Daya Manusia: Tantangan Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PSKK UGM.

Utomo, Sugeng Hadi dan Hadi Sumarsono. 2009. "*Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur". Jurnal JESP Vol.1, No.2*

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Web:

http://kamusbahasaindonesia.org/efisiensi

http://www.jogjainvest.jogjaprov.go.id/id/mengapa-yogyakarta/makroekonomi diakses pada 14 Mei 2015 pukul 07.36.